



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CUT MEUTIA AISYWANI
2. Jabatan : DIREKTUR RSUD
3. NHK : 902477

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.150.000.000
1. Tanah Seluas 118 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 150.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
3. Tanah Seluas 538 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
4. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA ACEH JAYA, WARISAN Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	182.000.000
1. MOBIL, MAZDA MAZDA VX-1 (4X2) V MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOTOR, HONDA NF 125 D Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
3. MOTOR, HONDA L1K02Q33L1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	68.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.799.600
F. HARTA LAINNYA	Rp.	55.000.000
Sub Total	Rp.	1.480.799.600



III. HUTANG

Rp. 250.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.230.799.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.